



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak  
NIP. 196407011991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SULAWESI SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Target    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                                         | (4)       |
| 1.  | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan                                                                                 | 1 Dokumen |
|     |                                                                                                         | 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah                                                                                           | 1 Dokumen |
| 2.  | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah                                                    | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                                              | 25 %      |
| 3.  | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                                                           | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi                        | 82 %      |
|     |                                                                                                         | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi                | 80 %      |
| 4.  | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah                                                                | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 %      |

| Kegiatan                                                                                | Anggaran                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                                                     | <b>Rp 128.257.000,-</b>   |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Rp 128.257.000,-          |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                            | <b>Rp 3.312.016.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                              | Rp 3.312.016.000,-        |

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekajahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitingak  
NIP. 196407011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitinjak  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak  
NIP. 196407011991031001